

## Kejar Status BLUD RSUD Talisayan Jadi Rujukan Pelayanan Kesehatan di Pesisir



Sumber gambar :

[https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/244/2024/10/08/IMG\\_6624-721490136.jpeg](https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/244/2024/10/08/IMG_6624-721490136.jpeg)

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau semakin serius untuk mengubah status Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pratama Talisayan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

**TANJUNG REDEB** – Saat ini telah dilakukan sosialisasi pementapan penetapan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) BLUD RSUD Pratama Talisayan. Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Berau, Muhammad Said, menyampaikan keinginan untuk segera mengubah status RSUD Pratama Talisayan menjadi BLUD. Terlebih, baru ada satu BLUD di Kabupaten Berau, yakni RSUD dr. Abdul Rivai.

BLUD dinilai penting untuk peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, supaya mudah dari sisi administrasi, penganggaran, dan dari sisi pengelolaan keuangannya. Sebab seluruhnya akan menjadi tanggung direktur. “Jarak RSUD Pratama Talisayan yang cukup jauh dari perkotaan diharapkan menjadi fasilitas pelayanan kesehatan rujukan di wilayah pesisir,” ungkapnya.

Pihaknya optimistis RSUD Talisayan nantinya dapat menjalankan pengelolaan BLUD. Termasuk mengatur keuangan dan merekrut tenaga kesehatan (Nakes). Mengingat kendala saat ini, pihaknya cukup kesulitan untuk memenuhi kekurangan nakes di sana. “Kalau belum BLUD, kekurangan tenaga direkrut dengan sistem tenaga honorer,

sementara pengangkatan tersebut tidak diperbolehkan lagi. Selain dari pada rekrutmen pegawai pemerintah daerah perjanjian kerja (PPPK) dan calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang dilakukan pemerintah,” urainya.

“Dengan diubah status menjadi BLUD, mereka nanti bisa mandiri merekrut Nakes yang dibutuhkan,” sambungnya.

Meskipun tidak perlu terus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan (Diskes) Berau, dengan mandiri secara pengelolaan diharapkan nantinya RSUD Pratama Talisayan akan lebih profesional dalam bekerja. Dirinya menegaskan hal itu juga perlu mempertimbangkan kondisi keuangan dan kemampuan anggaran rumah sakit. “Target BLUD ini akan dikejar secepatnya. Kami sadar selama ini kesulitan merekrut Nakes, karena untuk pengelolaan anggaran dan administrasi harus intens berkoordinasi dengan Diskes,” paparnya.

Dalam sosialisasi pemantapan penetapan PPK BLUD RSUD Prataman Talisayan ini juga mengundang konsultan kesehatan khusus yang membantu percepatan proses BLUD di Kabupaten Berau. Nantinya, diharapkan semua pasien tidak perlu lagi harus perawatan ke RSUD dr. Abdul Rivai, tapi bisa ditangani sendiri. “Saya yakin dan percaya BLUD RSUD bisa kita lakukan. Bukan untuk RSUD Pratama Talisayan, tapi juga untuk pusat kesehatan masyarakat (PKM) yang berada di empat kecamatan terdekat,” imbuhnya.

Kepala Diskes Berau, Lamlay Sarie, menambahkan pihaknya terus melakukan koordinasi dan sosialisasi terkait penetapan percepatan PPK BLUD RSUD Pratama Talisayan. Tujuan atau *output* koordinasi ini untuk memberikan pemahaman yang mendalam terhadap pemangku kepentingan di sektor kesehatan. Serta membangun kemampuan dan komitmen untuk mengimplementasikan BLUD secara optimal.

“Sehingga ke depan tidak hanya fokus peningkatan pelayanan publik di sektor kesehatan tapi juga efektifitas pengelolaan keuangan,” tuturnya. “Semoga langkah yang diambil RSUD Pratama Talisayan ini mampu memberikan solusi terbaik terkait pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” sambungnya. **(\*aja/far)**

#### **Sumber berita:**

1. Kaltimpost, Kejar Status BLUD RSUD Talisayan Jadi Rujukan Pelayanan Kesehatan di Pesisir, 08/10/2024

#### **Catatan:**

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Bupati Berau Nomor 78 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Talisayan (Perbup Berau 78/2019), Rumah Sakit Umum Daerah Talisayan selanjutnya disebut RSUD Talisayan adalah Rumah Sakit Umum Daerah Talisayan Kabupaten Berau.

2. Dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (3) Perbup Berau 78/2019 bahwa RSUD Talisayan yang dibentuk merupakan unit organisasi bersifat khusus yang memberikan pelayanan secara professional di bawah dinas.
3. Dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Bupati Berau Nomor 4 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pengajuan Utang/Pinjaman dan Pengelolaan Investasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Abdul Rivai dijelaskan bahwa badan layanan umum daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.